
Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali

Effectiveness of Post Disaster Rehabilitation and Reconstruction Program in Pali Regional Disaster Management Agency

Yus Erna¹⁾, Andries Lionardo²⁾ & Novita Wulandari¹⁾*

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2) Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Email: wulanrhendhu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Upaya dalam Menginventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali. Data-data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural, observasi partisipatif, dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di BPBD Kabupaten Pali menghadapi tantangan utama seperti integrasi program yang kurang optimal dan koordinasi yang belum memadai antara pemerintah dan masyarakat. Sarana yang ada, seperti Pusdalops PB, belum sepenuhnya efektif, sehingga sistem peringatan dini dan integrasi data perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan mitigasi risiko sangat penting. Evaluasi rutin terhadap pedoman dan kebijakan diperlukan untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan standar. BPBD juga perlu memperbaiki cara menginventarisasi kerusakan, termasuk dengan melaksanakan FGD secara rutin dan pendataan berkala, untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kata Kunci: Efektivitas; Rehabilitasi; Rekonstruksi; Pasca Bencana

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the Post-Disaster Rehabilitation and Reconstruction Program and Efforts to Inventory and Identify Post-Disaster Damage/Losses by the Regional Disaster Management Agency of Pali Regency. Data was collected through semi-structured interviews, participant observation, and documents and analyzed qualitatively. The research results show that the effectiveness of the post-disaster rehabilitation and reconstruction program at BPBD Pali Regency faces major challenges such as less-than-optimal program integration and inadequate coordination between the government and the community. Existing facilities, such as Pusdalops PB, are not yet fully effective, so the early warning system and data integration need to be improved. Community involvement in risk planning and mitigation is very important. Regular evaluation of guidelines and policies is necessary to ensure implementation under standards. BPBD also needs to improve the way it inventory damages, including by carrying out regular FGDs and periodic data collection, to increase the effectiveness of rehabilitation and reconstruction programs.

Keywords: Effectiveness; Rehabilitation; Reconstruction; Post-Disaster

How to Cite: Erna, Y., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2024). Efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali. *Journal of Law & Policy Review*. 2 (1): 139-146.



PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia (Beong, 2018; Hidayat et al., 2022). Bencana dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Koteng, 2012). Kategori bencana meliputi fenomena geologi seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan letusan gunung api; fenomena hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan; serta faktor biologi seperti wabah penyakit manusia dan penyakit pada tanaman atau ternak (Nugraha & Sulastri, 2018). Kegagalan teknologi seperti kecelakaan industri, transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia juga termasuk dalam kategori bencana (Hutagalung et al., 2022; Saragih et al., 2021). Selain itu, bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sering terkait dengan konflik, perebutan sumber daya, ideologi, agama, dan politik (Sitompul et al., 2022).

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, dan sosiologis yang menjadikannya rawan terhadap berbagai jenis bencana (Kristin & Salam, 2016). Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari BNPB menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana dan korban meninggal per jenis kejadian bencana terus mengalami peningkatan, yang menandakan risiko bencana di Indonesia tetap tinggi dan memerlukan perhatian yang serius (Beong, 2018; Sukandar et al., 2022).

Pada tahun 2018, Kabupaten PALI mengalami 10 kali bencana, termasuk kebakaran lahan, kebakaran rumah, banjir, batang roboh, dan angin puting beliung. Namun, pada tahun 2019, jumlah kejadian bencana menurun drastis menjadi hanya 2 kali, yaitu kebakaran lahan dan banjir. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keberhasilan program mitigasi bencana, perubahan iklim, atau perubahan dalam pelaporan bencana.

Data bencana di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa bencana dengan intensitas tertinggi adalah kekeringan air, sebanyak 185 kali, diikuti oleh kebakaran hutan, kebun, dan lahan sebanyak 95 kali. Banjir terjadi sebanyak 14 kali, mempengaruhi 472 jiwa, sementara kebakaran rumah/ruko sebanyak 7 kali tidak mengakibatkan korban atau kerugian yang terdata. Bencana lain seperti longsor, angin kencang, dan pohon tumbang juga dilaporkan dengan intensitas bervariasi.

Bencana yang terjadi, terutama selama era pandemi COVID-19, telah mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis dan tingkat kesejahteraan (Hidayat et al., 2022; Sisilia et al., 2022). Pandemi ini mengakibatkan kelumpuhan aktivitas masyarakat di berbagai bidang kehidupan (Engracia et al., 2022). Pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lembaga terkait (Beong, 2018; Kurniawan et al., 2021). Upaya ini menuntut peran aktif semua pihak untuk mempercepat pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan penyediaan sarana prasarana (Rangkuti et al., 2022).

Dalam konteks penanggulangan bencana, organisasi harus memastikan pola interaksi SDM yang seimbang dan selaras agar dapat menjalankan fungsi secara efektif (Beong, 2018; Manik et al., 2020). Kualitas SDM berperan penting dalam menentukan keberhasilan organisasi, termasuk dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Hamirul, 2020). Sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana, BNPB, dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, telah mendorong pembentukan 462 BPBD di seluruh Indonesia (Wahyuningsih & Suswanta, 2021). Dukungan ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, pendanaan, dan sarana prasarana untuk menumbuhkan kemandirian daerah dalam penanggulangan bencana (Manik et al., 2020). Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, dan membentuk lembaga khusus untuk menangani masalah bencana (Turnip et al., 2020).

Efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diukur dari pencapaian sasaran dan kemampuan memecahkan masalah (Muhammad Zubedy Koteng, 2012). Misalnya, teori efektivitas

dapat diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana program rehabilitasi di Kabupaten PALI mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana. Evaluasi ini dapat mencakup analisis keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas SDM lokal, efektivitas pendanaan, dan keberhasilan penyediaan sarana prasarana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PALI, serta upaya dan strateginya dalam menghadapi tantangan dan variabilitas bencana yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten PALI. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam tentang fenomena spesifik dalam konteks tertentu. Informan penelitian berjumlah 11 orang, terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota BPBD, masyarakat penerima manfaat, dan lembaga non-pemerintah. Mereka dipilih berdasarkan peran dan pengalaman yang relevan dengan program rehabilitasi.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pandangan mendalam, observasi dilakukan untuk memahami pelaksanaan program, dan dokumen yang dianalisis mencakup laporan dan data statistik terkait. Analisis data menggunakan model interaktif, meliputi tiga langkah: reduksi data untuk menyederhanakan informasi, penyajian data untuk visualisasi temuan, dan penarikan kesimpulan untuk evaluasi efektivitas program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali

Efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pali adalah aspek yang krusial dalam memastikan pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan setelah terjadinya bencana. Program ini bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana serta meningkatkan kesiapsiagaan untuk bencana di masa depan. Namun, analisis terhadap implementasi program ini menunjukkan adanya berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Dalam analisis program rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Pali, terlihat bahwa program-program yang dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan seperti perbaikan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data realisasi program kerja BNPB PALI Tahun 2021, terdapat fokus utama pada pelayanan administrasi dan peningkatan sarana serta prasarana perkantoran. Walaupun demikian, program rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih spesifik sering kali mengalami kekurangan dalam hal hasil yang diharapkan.

Salah satu masalah utama adalah kurangnya integrasi antara program rehabilitasi dan kegiatan pemulihan lainnya. Misalnya, meskipun sarana dan prasarana diperbaiki, sering kali tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan koordinasi antar program agar lebih sinergis dan terintegrasi. Koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait merupakan kunci dalam keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi. BPBD Pali menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya dengan jelas. Dalam konteks ini, sinergi antara BPBD Pali dan pihak-pihak terkait, seperti organisasi non-pemerintah (NGO) dan masyarakat lokal, harus ditingkatkan.

Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program-program yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program, mulai dari



perencanaan hingga evaluasi, dapat membantu memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu mengatasi masalah yang ada. Pelatihan dan penyuluhan yang intensif dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

Sarana dan prasarana yang memadai adalah elemen penting dalam mendukung efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi (Arifin et al., 2022). Data kondisi meteorologis Kabupaten Pali menunjukkan bahwa curah hujan yang tinggi dan kecepatan angin yang signifikan dapat menyebabkan bencana seperti banjir. Dalam hal ini, keberadaan fasilitas seperti Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan peralatan meteorologi sangat penting. Namun, meskipun fasilitas-fasilitas ini sudah ada, efektivitasnya dalam mendukung program rehabilitasi masih terbatas. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya integrasi antara data yang diperoleh dan respons yang diambil. Misalnya, meskipun data meteorologis memberikan informasi tentang potensi bencana, respon terhadap informasi ini tidak selalu cepat dan tepat. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada sistem peringatan dini yang lebih baik dan integrasi data yang lebih efisien dengan kegiatan lapangan.

Kondisi geografis dan klimatologi Kabupaten Pali menempatkan beberapa kecamatan dalam kategori risiko tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Penanganan risiko bencana harus mencakup langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Program-program rehabilitasi dan rekonstruksi harus dirancang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan dengan melakukan perbaikan infrastruktur yang tahan bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang mitigasi risiko.

Pelatihan dan simulasi bencana untuk masyarakat juga merupakan aspek penting dalam mitigasi risiko. Masyarakat yang terlatih dapat merespons bencana dengan lebih baik dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, program-program mitigasi harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, sehingga solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Sejak bencana besar seperti Tsunami Aceh 2004, berbagai kebijakan dan pedoman telah dikembangkan untuk meningkatkan penanganan bencana. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008, misalnya, memberikan pedoman bagi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun pedoman ini sudah ada, tantangan dalam penerapan di lapangan masih signifikan. Ada kebutuhan untuk memantau dan mengevaluasi penerapan pedoman tersebut secara rutin untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi pedoman yang ada dan adaptasi terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan di lapangan adalah hal yang penting. BPBD Pali harus aktif dalam mengidentifikasi kekurangan dalam implementasi pedoman dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Proses evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan memastikan bahwa program-program yang diterapkan benar-benar efektif.

Model-model efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (Steers, 1985), seperti model optimasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada perilaku, dapat diterapkan untuk menilai efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD Pali. Dalam model optimasi tujuan, efektivitas program diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Dalam hal ini, BPBD Pali perlu memastikan bahwa tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

Perspektif sistem, di sisi lain, menekankan pada bagaimana berbagai elemen dalam sistem berinteraksi untuk mencapai hasil yang diinginkan. BPBD Pali harus memastikan bahwa semua elemen program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, saling berkoordinasi dan berintegrasi dengan baik. Tekanan pada perilaku, yang mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan individu dan kelompok, juga perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor seperti motivasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi dapat mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Secara keseluruhan, efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pali menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan. Koordinasi antara berbagai pihak,



integrasi program, dan peningkatan sarana serta prasarana merupakan area-area yang perlu diperbaiki. Program-program yang ada harus lebih terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan bencana yang dihadapi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program sangat penting untuk memastikan bahwa program yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Upaya dalam Menginventarisasi dan Identifikasi Kerusakan/Kerugian Pasca Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pali

Pengelolaan pasca bencana yang efektif sangat bergantung pada kemampuan lembaga terkait untuk secara akurat menginventarisasi dan mengidentifikasi kerusakan serta kerugian yang ditimbulkan. Di Kabupaten Pali, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran strategis dalam proses ini. Namun, analisis terhadap praktik yang ada menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BPBD dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi kerusakan pasca bencana masih tergolong terbatas. Hal ini berdampak pada efektivitas dari program rehabilitasi dan rekonstruksi yang diterapkan. Beberapa isu utama perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas upaya tersebut, termasuk kurangnya dorongan dari aparaturnya untuk melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan para pemangku kepentingan, pendataan yang tidak teratur, dan perlunya orientasi pada keberlanjutan program kerja.

Salah satu masalah utama dalam upaya inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana di Kabupaten Pali adalah kurangnya dorongan dari aparaturnya untuk melaksanakan FGD dengan para pemangku kepentingan. FGD merupakan metode yang sangat efektif untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah. Diskusi ini memungkinkan BPBD untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang kerusakan yang terjadi dan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Tanpa FGD yang rutin dan terkoordinasi, data yang diperoleh bisa jadi tidak mencakup semua aspek kerusakan dan kebutuhan masyarakat, sehingga program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam FGD dapat memperkaya informasi yang dikumpulkan dan memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan dipertimbangkan. Oleh karena itu, BPBD perlu meningkatkan dorongan untuk melaksanakan FGD secara berkala setelah terjadinya bencana. Selain itu, pelaksanaan FGD harus dipastikan melibatkan seluruh pihak terkait dengan cara yang efektif, sehingga proses identifikasi kerusakan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Selain masalah FGD, pendataan yang tidak teratur juga menjadi kendala dalam menginventarisasi kerusakan pasca bencana. Pendataan berkala sangat penting untuk memantau kondisi terkini dan merencanakan program rehabilitasi yang sesuai. Di Kabupaten Pali, pendataan yang dilakukan sering kali bersifat ad-hoc atau hanya dilakukan setelah bencana tanpa adanya jadwal yang tetap. Idealnya, pendataan harus dilakukan secara berkala, misalnya setiap triwulan atau per semester, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh selalu up-to-date dan relevan. Pendataan yang teratur memungkinkan BPBD untuk melacak perkembangan kondisi pasca bencana dan mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu.

Dengan melakukan pendataan berkala, BPBD dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang dampak bencana dan kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dari pendataan ini harus diintegrasikan dengan data historis untuk memberikan analisis yang lebih mendalam. Teknologi informasi seperti sistem informasi geospasial (GIS) dan perangkat lunak manajemen bencana dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara efisien. Dengan bantuan teknologi ini, BPBD dapat memvisualisasikan data kerusakan dan memetakan area yang paling terdampak, sehingga perencanaan program rehabilitasi dapat dilakukan dengan lebih baik.

Aspek keberlanjutan juga merupakan faktor penting dalam merancang program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Program yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat



dan berkelanjutan akan lebih efektif dalam membantu masyarakat pulih dari bencana. Untuk itu, BPBD perlu memastikan bahwa program kerja yang dirancang didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Jika data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, maka program rehabilitasi yang diterapkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dapat memberikan dampak yang optimal.

Keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan pendekatan berbasis data. Data yang diperoleh dari pendataan berkala dan FGD harus digunakan untuk merancang program yang sesuai dengan kondisi aktual dan prioritas masyarakat. Selain itu, program-program tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Program yang berkelanjutan tidak hanya akan membantu dalam pemulihan jangka pendek tetapi juga akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Untuk meningkatkan upaya dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi kerusakan pasca bencana di Kabupaten Pali, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, BPBD harus meningkatkan dorongan dan fasilitasi pelaksanaan FGD dengan berbagai pemangku kepentingan. FGD harus diadakan secara teratur setelah terjadinya bencana untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif mengenai kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Ini akan membantu dalam mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi pasca bencana dan merencanakan program yang lebih efektif.

Kedua, BPBD perlu mengimplementasikan sistem pendataan berkala yang terstruktur. Pendataan harus dilakukan setidaknya setiap triwulan atau semester, dengan hasil yang diintegrasikan dengan data historis untuk memberikan analisis yang lebih mendalam. Penggunaan teknologi informasi seperti GIS dapat membantu dalam visualisasi dan analisis data kerusakan, sehingga memudahkan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga, BPBD harus memastikan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan berkelanjutan. Program harus dirancang berdasarkan data yang akurat dan relevan, serta mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Keempat, BPBD perlu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak yang diinginkan. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap efektivitas program, serta identifikasi dan perbaikan terhadap kekurangan yang ada.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, BPBD Pali dapat meningkatkan efektivitas upaya inventarisasi dan identifikasi kerusakan pasca bencana, serta memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, proses pemulihan pasca bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, membantu masyarakat untuk pulih dan kembali ke kehidupan normal dengan lebih cepat.

SIMPULAN

Efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di BPBD Kabupaten Pali menunjukkan beberapa tantangan utama. Integrasi program yang kurang optimal dan koordinasi yang belum memadai antara pemerintah dan masyarakat perlu diperbaiki. Sarana dan prasarana yang ada, seperti Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), belum sepenuhnya efektif, sehingga sistem peringatan dini dan integrasi data harus ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan mitigasi risiko sangat penting untuk kesesuaian dan efektivitas program. Evaluasi rutin terhadap pedoman dan kebijakan yang ada juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan standar.

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pali dalam menginventarisasi kerusakan pasca bencana masih menghadapi tantangan signifikan.



Keterbatasan dalam pelaksanaan diskusi kelompok terfokus (FGD), pendataan yang tidak teratur, dan kurangnya fokus pada keberlanjutan mempengaruhi efektivitas program rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk meningkatkan efektivitas, BPBD perlu rutin mengadakan FGD dengan pemangku kepentingan, melakukan pendataan secara berkala, dan memastikan program rehabilitasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini akan memperbaiki proses pemulihan dan mendukung pemulihan masyarakat secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z., Sihombing, M., & Kusmanto, H. (2022). Efektifitas Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2379–2390. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1080>
- Beong, S. dkk. (2018). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 176–185.
- Engracia, N. V., Kurniawati, E., & Hadi, N. (2022). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan UMKM di Kampung Tahu Kediri pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 484–494. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1227>
- Hamirul, H.-. (2020). Potret Patologi Birokrasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang (BPN-ATR), Kota Cimahi. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 145. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.145-159.2019>
- Hidayat, A., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Tahapan Kampanye dan Sosialisasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Covid-19. *Perspektif*, 11(3), 1105–1118. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6444>
- Hutagalung, B. N., Isnaini, I., & Haikal, M. R. (2022). Peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan Hukum atas Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia di PT. Kiat Unggul. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1377–1387. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1299>
- Koteng, M. Z. (2012). Efektifitas Program Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami di Aceh. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(1), 67–91. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kristin, R., & Salam, R. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(1), 79–96.
- Kurniawan, M. A., Badaruddin, B., & Humaizi, H. (2021). Partisipasi Masyarakat Tionghoa dalam Pelaksanaan Musrenbang Pada Kelurahan Sukadamai. *Perspektif*, 10(1), 218–229. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4300>
- Manik, A., Kusmanto, H., & Lubis, M. S. (2020). Analisis Reliabilitas dan Responsivitas dalam Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 65–74. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.11>
- Muhammad Zubedy Koteng. (2012). Efektifitas Program Perlindungan Anak Bagi Anak Yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami di Aceh. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 1(1), 67–91. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nugraha, D. S., & Sulastri, L. (2018). Faktor Kompetensi Perencana, Data dan Anggaran pada Efektivitas Perencanaan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 172. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1904>
- Rangkuti, F. S., Badaruddin, B., & Siregar, R. T. (2022). Evaluasi Implementasi Program Sekolah Adiwiyata di Sekolah Dasar Swasta Nurcahaya Kota Medan. *Perspektif*, 11(4), 1529–1538. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7426>
- Saragih, D., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2021). Kebijakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Korban. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1234–1245. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.891>
- Sisilia, H. S., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2022). Strategi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 pada Satuan Menengah di Provinsi Jawa Tengah. *Perspektif*, 11(3), 1061–1069. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6275>



- Sitompul, I. R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1687–1696. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.928>
- Steers, M. R. (1985). *Company Organizational Effectiveness*. Jakarta: Erlangga.
- Sukandar, R., Nurhajati, L., Oktaviani, R. C., & Wijayanto, X. A. (2022). Komunikasi Publik Pemerintah Republik Indonesia terkait Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Perspektif*, 11(2), 771–778. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6281>
- Turnip, H., Hendra, Y., & Matondang, A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Kantor Search and Rescue Medan dalam Pencarian Orang Hilang di Gunung Sibayak The Title Should Be Brief and Informative No More Than 15 Words in English. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 7–11.
- Wahyuningsih, D., & Suswanta, S. (2021). Analysis of the Use of Twitter BPBD DKI in Disaster Mitigation. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 9(1), 77–92.